

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketidaksetaraan gender di Pakistan yang terjadi saat ini masih menjadi isu yang problematik. Masalah – masalah itu antara lain minimnya akses pendidikan kepada wanita, tidak adanya ruang politik, wanita kerap terjebak pada pernikahan dini dengan paksa, dan lain sebagainya. Ketidaksetaraan gender menjadi isu internasional khususnya dalam politik karena kasus ini bukan masalah domestik, sehingga munculnya ancaman negara lain bahkan jika dilihat dari sisi ekonominya hal ini akan merugikan negara. Hal ini, menjadikan masalah tersebut menjadi permasalahan yang kompleks (Sihite, 2007).

Masalah masalah itu menempatkan Pakistan di urutan 133 dari 135 indeks kesenjangan global pada tahun 2011. Negara Pakistan merupakan negara yang memiliki angka cukup tinggi terkait masalah ketidaksetaraan gender sehingga mendapatkan perhatian dari dunia Internasional. Hal ini menjadi pengaruh terhadap tingginya ketidaksetaraan gender dimana latar belakang permasalahan tersebut karena adanya faktor kesenjangan sosial dan kondisi politik yang tidak stabil (Qasrani, 2016). Oleh karena itu, pemerintah tidak fokus terhadap kebijakan terkait permasalahan tindak ketidaksetaraan gender (Sheikh, 2013).

Pada tahun 2012, Pemerintah Pakistan mengajukan asistensi United Nation Women (UN Women) untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender di Pakistan sehingga UN Women hadir di Pakistan untuk mendorong terbentuknya kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan. Kemudian Perdana Menteri Pakistan yaitu Muhammad Nawaz Sharif mengatakan: “Semua negara akan memperoleh manfaat dari pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu kami bertekad untuk memastikan peran yang lebih sentral bagi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang lain dari kehidupan nasional kami.” (UN Women, 2012). Lalu, Ibu Shanaz Wazir Ali dari Kantor Perdana Menteri Pakistan dan Anggota delegasi lainnya adalah Bushra Zulqarnain selaku anggota Komnas

Perempuan, Khawar Mumtaz anggota Komnas Perempuan, perwakilan masyarakat sipil, dan Saeed Ahmed Alvi selaku sekretaris Kementerian Hak Asasi Manusia ikut berpartisipasi dalam pertemuan dengan UN Women. Dalam pertemuan ini UN Women dipersilahkan menerapkan kebijakannya di Pakistan (Pacific, 2012). Oleh karena itu, UN Women hadir untuk menjalankan mandat membantu negara Pakistan mewujudkan kesetaraan gender dengan cara membantu negara Pakistan untuk menerapkan standar global dalam mencapai kesetaraan gender. Organisasi internasional ini telah menerapkan hak-hak bagi perempuan di Pakistan. Dalam menjalankan tugasnya UN Women sendiri bekerjasama dengan pemerintah organisasi local di Pakistan. UN Women memiliki tujuan yaitu mewujudkan kesetaraan gender di Pakistan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan oleh PBB atau yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* yang berisi tentang pencapaian target penghapusan ketidakadilan gender.

Program Kerja UN Women diantaranya kepemimpinan dan partisipasi politik, pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, menjaga perdamaian dan keamanan, aksi kemanusiaan, keterlibatan pemuda pada kesetaraan gender, perencanaan nasional dan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. (Collection, 2010). Selain itu, UN Women bekerja sama dengan pemerintah Pakistan, Organisasi local dan Lawyers for Human Rights and Legal Aid (LHRLA) (LHRLA, 2012). UN Women dan pemerintah menerapkan The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women atau (CEDAW) dengan baik dan benar serta membuat kebijakan pro terhadap perempuan (Shagufta Omar, 2013).

Kemudian, UN Women dan Pemerintah Pakistan melakukan penandatanganan MoU terkait kesetaraan gender. UN Women bekerjasama dengan (LHRLA) dengan tujuan untuk membangun Women Protection Unit atau (WPU) dalam melayani perempuan yang telah mengalami tindakan kekerasan untuk melakukan berbagai pelatihan bagi semua pihak hukum dan organisasi yang memproses kasus kekerasan terhadap perempuan (Madadgaar, 2019). Kemudian ada dua

program UN Women yaitu Safe Cities and Safe Public Spaces dan Program Essential Service Package (ESP). Program pertama untuk memastikan keamanan perempuan di ruang public. Program kedua, untuk mengatasi kurangnya akses pelayanan social bagi kaum perempuan yang mengalami kekerasan. Melalui program-program ini, Peran UN Women kembali ditegaskan sebagai aktor yang membantu pemerintah yang belum mampu memastikan keamanan kehidupan perempuan di ruang publik melalui program Safe Cities and Safe Public Space (UN Women, 2019).

UN Women juga membantu Pemerintah Pakistan yang belum dapat mengatasi kurangnya akses pelayanan sosial bagi perempuan dan anak perempuan yang mengalami tindak kekerasan melalui Program (ESP). Setiap upaya yang dilakukan oleh UN Women di Pakistan berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut serta sesuai dengan upaya UN Women untuk mewujudkan poin nomor lima Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Selain itu, UN Women mengadakan kampanye dan advokasi sebagai upayanya di Pakistan. Kampanye tersebut antara lain Kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender (GBV), Kampanye #StopJahezkhori, dan Kampanye #BeatMe. Melalui kampanye-kampanye tersebut, UN Women menjalankan peran aktor karena kegiatan tersebut diselenggarakan oleh UN Women secara independen sesuai dengan visi UN Women serta ketiga kampanye tersebut dilaksanakan di Pakistan juga sebagai bentuk bantuan UN Women terhadap Pemerintah Pakistan.

Meskipun demikian tidak semua program UN Women di Pakistan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan UN Women untuk mewujudkan gender equality. Dalam implementasinya masih ditemukan kasus diskriminasi terhadap perempuan di Pakistan hingga saat ini seperti kasus yang baru terjadi yang dialami oleh Sarah Inam yang merupakan seorang ekonom perempuan berusia 37 Tahun yang disiksa dan dibunuh oleh suaminya bernama shahnawaz dengan cara dipukul menggunakan halter sampai mati dan kemudian mayat Sara disembunyikan didalam bak kamar mandi. Dalam kasus ini Shahnawaz bantu oleh ayahnya Ayaz

Amir yang merupakan seorang kolumnis terkenal dan analisis politik di Televisi. (Soomro, 2022). Beberapa program UN Women dijalankan seperti Kampanye #StopJahezkhori yang diramaikan dengan unggahan para publik figur di platform media sosial untuk mengakhiri praktik mahar serta Kampanye #BeatMe yang terdengar di berbagai negara dan berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Beberapa program tidak berhasil tetapi masih berjalan hingga saat ini seperti Safe Cities and Safe Public Spaces dan Program (ESP).

Permasalahan itu menempatkan Pakistan dalam Indeks Global Ketidaksetaraan Gender pada tahun 2020 peringkat ke-145 dari 153 Negara. Peringkat ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dari tahun ke tahun walaupun belum menunjukkan angka yang signifikan. Pada Tahun 2011 sebelum UN Women masuk ke Pakistan ketidaksetaraan gender menempati peringkat ke 133 dari 135 Negara dan setelah UN Women masuk pada tahun 2012 sampai dengan 2022 menempati peringkat ke 145 dari 146 Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran UN Women belum berhasil dalam menurunkan tingkat ketidaksetaraan gender di Pakistan. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada penyebab ketidakberhasilan UN Women dalam menurunkan indeks global ketidaksetaraan gender di Pakistan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memfokuskan pertanyaan penelitian tentang apa yang menyebabkan ketidakberhasilan UN Women dalam menurunkan indeks Global Ketidaksetaraan Gender di Pakistan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor ketidakberhasilan UN Women dalam menurunkan indeks global ketidaksetaraan gender di Pakistan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan UN Women dalam menurunkan angka ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan di Pakistan dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya dalam memperkaya khasanah ilmu dalam kajian Hubungan Internasional.

1.5 Sistematika Bab

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penulis akan membagi penulisan skripsi ini menjadi 4 bab yaitu:

Bab I yang akan berisi pendahuluan, yang mana berisi latar belakang masalah terkait Upaya UN Women di Pakistan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab.

Bab II yang merupakan tinjauan pustaka, yang mana berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III yang merupakan metode penelitian, dalam bab ini penulis akan menguraikan jenis penelitian dan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan teknik analisa data serta variable penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian

Bab IV yang merupakan hasil dan pembahasan yaitu pertama, UN Women sebagai organisasi internasional perlindungan perempuan yang dimana menjelaskan mengenai bentuk, faktor penyebab dan dampak kekerasan terhadap perempuan lalu upaya yang dilakkan pemerintah Pakistan dalam menangani isu tersebut. Kedua, kekerasan terhadap perempuan di Pakistan dimana dalam hal ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kerjasama dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah pakistan dan organisasi lokal, lalu menjelaskan mengenai kampanye dan program anti kekerasan. Ketiga, upaya UN Women dalam membantu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Pakistan, ketidak berhasilan UN Women dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Pakistan